

**PERANAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PEMBERDAYAAN
PELAKU IKM DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program
Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Padang.*



Disusun Oleh :

RAMONA PRAYOGA RAMADHINA

20042037/2020

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2024

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Peranan Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan
Pelaku IKM Di Kabupaten Pesisir Selatan

Nama : Ramona Prayoga Ramadhina

TM/NIM : 2020/20042037

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

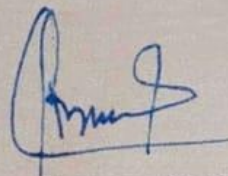
Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Padang, 01 April 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing,



Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D
NIP. 19640208 199003 2 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

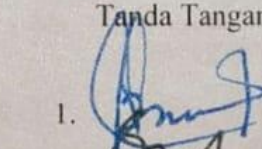
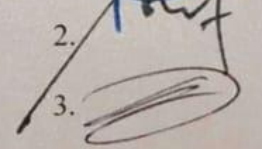
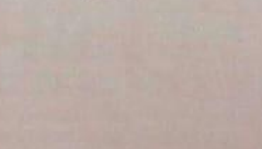
Pada hari Senin, 22 Juli 2024 Pukul 10.00 s/d 11.00 WIB

Peranan Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Pelaku IKM Di Kabupaten Pesisir Selatan

Nama : Ramona Prayoga Ramadhina
TM/NIM : 2020/20042037
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial


Padang, 22 Juli 2024

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D	1. 
Anggota	: Rahmadhani Yusran S.Sos M.Si	2. 
Anggota	: Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA	3. 

Mengesahkan :

Dekan FIS UNP


Afriva Khaldir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D
NIP. 19660411 199003 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Nama : Ramona Prayoga Ramadhina
TM/NIM : 2020/20042037
Tempat/Tanggal Lahir : Malang/22 November 2002
Departemen : Ilmu Administrasi Negara (S1)
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini berjudul "Peranan Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Pelaku IKM di Kabupaten Pesisir Selatan" merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 26 Agustus 2024
Yang Membuat Pernyataan



Ramona Prayoga Ramadhina
(20042037)

ABSTRAK

Ramona Prayoga Ramadhina (2024) : Peranan Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Pelaku IKM di Kabupaten Pesisir Selatan

Penelitian ini tujuannya adalah untuk meneliti bagaimana pihak-pihak yang terlibat (pemangku kepentingan) berperan dalam membantu pemberdayaan para pelaku usaha kecil menengah (IKM) di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini dilatar belakangi belum optimalnya peran dari pemangku kepentingan dalam memberdayakan pelaku IKM di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Untuk mendapatkan data dilakukan proses wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Untuk memastikan keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber.

Penelitian menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat (pemangku kepentingan) dalam memberdayakan pelaku IKM perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan belum melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing. Disebabkan karena masih terdapat kendala yang dihadapi oleh masing-masing pemangku kepentingan dalam melakukan pemberdayaan pelaku IKM perikanan, yaitu terbatasnya anggaran dana untuk melakukan program pemberdayaan, kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan waktu pelaksanaan pemberdayaan serta kurangnya motivasi dari pelaku IKM untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan.

Kata Kunci: Peran Pemangku kepentingan, Pemberdayaan, Pelaku IKM

KATA PENGANTAR

Berkat pertolongan dan petunjuk dari Allah SWT, yang sudah memberi kemudahan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi berjudul **“Peranan Pemangku kepentingan Dalam Pemberdayaan Pelaku IKM Di Kabupaten Pesisir Selatan”**.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat meraih gelar S.AP (Sarjana Administrasi Publik) di Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah membimbing dan membantu penulis selama ini. Terima kasih kepada Bapak/Ibu/Sdr:

1. Bapak D.r. Ir. Krismadinata, S.T.,M.T. sebagai Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, SH.,M.Hum.,MAPA.,Ph.D sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd.,Ph.D sebagai Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang dan sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi karena sudah membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis sewaktu proses penulisan skripsi.
4. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si dan Bapak Dr. Zikri Alhadi, S.IP.,MA sebagai Dosen yang menjadi penguji skripsi yang sudah memberikan saran, masukan, dan kritik yang sangat membantu penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Para dosen dan staf pengajar di Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat semasa penulis kuliah.
6. Ibu Sri Murti S.E., M.M selaku Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan yang telah bersedia menyisihkan waktu dan memberikan informasi untuk penelitian ini.
7. Wali Nagari Ampang Pulau dan seluruh perangkat yang sudah mengizinkan untuk melakukan penelitian ini dan bersedia memberikan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Gusriwandi S.E selaku HRD Manajer Budiman Swalayan karena sudah menyisihkan waktu dalam mengarahkan dan memberikan informasi terkait skripsi ini.
9. Kepada pelaku IKM Perikanan Kecamatan Koto XI Tarusan yang mau membantu dan memberikan informasi untuk penelitian ini.
10. Teristimewa Bapak Basrianto dan Ibu Reni Tohatu sebagai kedua orang tua tercinta yang telah membesarkan, mengajarkan, serta selalu berdoa dan mendukung penulis dalam segala hal. Terima kasih atas segala upaya yang telah mendukung perkuliahan penulis sampai saat ini.

11. Teruntuk Saudara penulis Andhika Pandu Dewa Nata dan Abid Pasya Ariyadi yang telah mendukung penulis dari awal perkuliahan hingga saat sekarang ini.
12. Teruntuk Risaldi Safrudin Yusuf yang selalu memberikan dukungan, motivasi, selalu meyakinkan bahwa penulis pasti bisa menyelesaikan skripsi ini, selalu meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar yang baik bagi penulis hingga akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan.
13. Kepada Naya, Tyara, Yoga, Puji, Nabil dan Addib yang sudah membersamai perjalanan skripsi penulis dari awal hingga akhir.

Semoga segala bantuan, bimbingan, dan arahan dari Bapak/Ibu serta teman-teman semuanya dianggap sebagai amal ibadah dan Tuhan YME. Penulis berusaha dengan sebaik-baiknya dalam menyusun skripsi ini. Apabila, masih terdapat kekurangan, penulis meminta kepada pembaca untuk memberikan masukan dan kritik yang membangun demi menyempurnakan tulisan ini. Terima kasih atas dukungan yang diberikan. Diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan secara khusus bagi penulis, Aamiin.

Padang, 2024

Ramona Prayoga Ramadhina
20042037

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Batasan Masalah	14
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	15
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kajian Teoritis.....	16
1. Konsep Peranan	16
2. Stakeholder	17
3. Pemberdayaan	20
4. Industri Kecil dan Menengah (IKM).....	23
B. Kajian Penelitian yang Relevan	24
C. Kerangka Konseptual.....	26
BAB III.....	27
METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Fokus Penelitian.....	27
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Informan Penelitian.....	28
E. Jenis Dan Sumber Data	30
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	30

G. Teknik Pengujian Keabsahan Data	31
H. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Temuan Umum	34
B. Temuan Khusus.....	46
C. Pembahasan.....	62
BAB V.....	77
PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Kelompok Sentra Pengolahan Hasil Perikanan.....	3
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Produk IKM Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah masuk ke Budiman Swalayan	11
Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual	26
Gambar 4. 1 Sentra IKM Olahan Hasil Perikanan	53
Gambar 4. 2 Program pendampingan pengembangan dan diversifikasi produk dari Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	47
Gambar 4. 3 Program Matching Fund IKM Perikanan	51
Gambar 4. 4 Produk IKM masuk ke Budiman Swalayan	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri kecil dan menengah atau sering juga disingkat IKM, sebagai salah satu landasan terpenting dalam pemerintahan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Sebagai sebuah sektor yang terdiri dari usaha kecil dan menengah, IKM memiliki peran penting dalam ekonomi Indonesia dikarenakan kemampuannya yang luas dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan jadi sumber pendapatan utama dan sekunder di banyak keluarga di Indonesia. IKM memainkan peran penting dan strategis untuk memajukan perekonomian nasional, khususnya penciptaan lapangan pekerjaan dan penghasilan bagi masyarakat kurang mampu, serta membantu mengurangi angka orang miskin dengan menyediakan pendapatan (Tambunan, 2002).

Berdasarkan BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2021, IKM di Indonesia berjumlah sebanyak 4,41 juta usaha kecil menengah di Indonesia yang memberi pekerjaan kepada sekitar 15,64 juta orang. Sektor paling berpengaruh adalah makanan dan minuman, *fashion* dan kerajinan. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut industri kecil dan menengah (IKM) menyerap sebanyak 12,39 juta orang, yang sama dengan 66,25% dari total lapangan kerja sektor industri. Direktur Jenderal dibidang Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) di Kementerian Perindustrian, Reni Yanita menyatakan sepanjang tahun 2022, sektor IKM juga menghasilkan 21,37% dari total output industri pengolahan. IKM

memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja dan menyeimbangkan kesejahteraan.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten dengan wilayah geografis maritim yang luas. Secara fisik Kabupaten Pesisir Selatan (dalam pesisiselatankab.go.id) terletak di pesisir pantai dan memiliki garis pantai 234 km dengan 57 pulau. Kondisi wilayah yang demikian mempunyai berbagai potensi sumber daya alam, dan tentunya juga terdapat peluang ekonomi yang besar. Dikarenakan lingkungan tempat tinggal penduduk Pesisir Selatan lebih banyak menghadap ke pesisir, sehingga menjadi potensi yang memungkinkan bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di pesisir.

Dengan kondisi wilayah dan potensi lautnya yang banyak menghasilkan ikan, sehingga memungkinkan penduduk di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan untuk membentuk kelompok dalam bentuk Industri Kecil dan Menengah (IKM). Dalam (kitasiar.com) Mimi Riarty Zainul sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Pesisir Selatan, mengatakan bahwa jumlah pelaku IKM di Pesisir Selatan yang tercatat hingga tahun 2022 sebanyak 3.687, yang tersebar di 15 kecamatan.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) perikanan di Kecamatan Koto XI Tarusan terbagi menjadi 14 kelompok.

Tabel 1. 1 Data Kelompok Sentra Pengolahan Hasil Perikanan

No	Nama Kelompok	Nagari	Kecamatan	Jenis Produk	Nama Anggota
1	Bunda Saiyo Wisata	Carocok Anau Ampang Pulau	Koto XI Tarusan	1. Amplang Ikan 2. Stik ikan	1. Basril 2. Armanida 3. Sudesmawati 4. Luci Afrinila 5. Yulva nora 6. Efnawati 7. Gita Nastalia 8. Lili Harnopit 9. Yunelda 10. Siska Hariani 11. Sri Maida Eka Putri 12. Fajar Okta Wiliem
2	Bunda Bahari	Carocok Anau Ampang Pulau	Koto XI Tarusan	Rakik Maco	1. Septia Novermi 2. Mira Indreswita 3. Tasya Cornelia Debora 4. Mela Gusnawati 5. Pratiwi 6. Nisa Pramadeli 7. Rini Mulyana 8. Yenti Hera Wati 9. Devi Yulita 10. Arjunita 11. Susilawati
3	Sabai Nan Aluih	Kapuh	Koto XI Tarusan	Rakik	1. Meri Darna 2. Yelisna 3. Wira Nofriana 4. Asnida 5. Leni Fitriyenti 6. Intan Hendri Novita 7. Silvia Dama Yanti 8. Yusniwar 9. Nanda Anggraini

No	Nama Kelompok	Nagari	Kecamatan	Jenis Produk	Nama Anggota
4	Nopelda	Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai	Koto XI Tarusan	1. Teri Crispi 2. Serundeng Ubi 3. Arai Pinang 4. Keripik Pakis	1. Nora 2. Elda Zufarina 3. Gusmaneli 4. Dasniq 5. Sri Anita 6. Frisna
5	Karta Indah	Pulau Karam Ampang Pulai	Koto XI Tarusan	Fillet Ikan	1. Antoni 2. Leli Marlina 3. Darwita 4. Nora Yulia Putri 5. Elfadenti 6. Karmila 7. Witnalis 8. Desmatika Marini 9. Sandri Risada Permana
6	Jaya Bahari	Ampang Pulai	Koto XI Tarusan	1. Abon Ikan 2. Kue Abon 3. Stik Abon	1. Y. Irsep Gelvina 2. Y. Fitri Trisnawati 3. Ramadani 4. Desi Aria Yulvina 5. Sukmawati 6. Engla Gusfita Sari 7. Asmawarni
7	KUW Mekar Sari	Ampang Pulai	Koto XI Tarusan	1. Rendang Tuna 2. Rendang Lokan, 3. Siput Teri 4. Keripik	1. Muhammad Akbar Sugandi 2. Selvi Maulana 3. Srivika Irawati 4. Defitri 5. Ismawari 6. Asnah

No	Nama Kelompok	Nagari	Kecamatan	Jenis Produk	Nama Anggota
				Udang	7. Ildawati 8. Silvia Wahyuni 9. Kasmiasi 10. Rosmina 11. Fitrianti 12. Rici Fatmala Sari 13. Deswit 14. Siswati
8	Bunga Sagu	Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai	Koto XI Tarusan	1. Bakso Ikan 2. Stik Udang	1. Emsuryani Tasar 2. Sri Iwa Gestari 3. Darmis 4. Wiwit Eliza 5. Azmaneli 6. Nova Risna 7. Ermipet 8. Ernalis 9. Nurmanis 10. Yasniati
9	Teri Berselimut	Ampang Pulai	Koto XI Tarusan	Teri Berselimut	1. Jasmaneli 2. Deswita 3. Refni Baslita 4. Eka Syafniati 5. Yusmaneli 6. Nureni 7. Rosmalena 8. Putri Indah Maharani
10	Cahaya Bahari	Carocok Anau Ampang Pulai	Koto XI Tarusan	Ikan Teri	1. Nasril 2. Hendriawadi 3. Basril 4. Syamzanover 5. Zulkifi 6. Hendra 7. Anggi 8. Misnan 9. Doni sarduan 10. Joni 11. Izak
11	Pinus	Kapuh	Koto XI	Rakik	1. Eva Marlinda 2. Fitnawati

No	Nama Kelompok	Nagari	Kecamatan	Jenis Produk	Nama Anggota
	Kapuh		Tarusan		3. Ria Marlina 4. Delfita 5. Yusmaini 6. Jusniarti 7. Elda 8. Okta Rita 9. Vero Rahayu
12	Uni Kito <i>Seafood</i>	Ampang Pulai	Koto XI Tarusan	1. Rendang lokan 2. Dendeng ikan	1. Yance Karmila 2. Vitra Hayati 3. Silfia Syofyan 4. Andri Yeni 5. Lili Febrianti 6. Sep Gusnita 7. Desna Yenti 8. Lusi 9. Lara 10. Teti Sumira
13	Kambeh Saiyo	Ampang Pulai	Koto XI Tarusan	1. Atom ikan 2. kerupuk ikan tongkol	1. Jekri Andi 2. Adetis Yani Indri 3. Tuti Wahyuni 4. Andriadi 5. Widya Monesa 6. Peprika 7. Evi Suryani 8. Azeilman 9. Nunung Sri Wahyuni 10. Jonismet
14	Usaha Bersama	Ampang Pulai	Koto XI Tarusan	rakik	1. Leli Suryani 2. Sesnawati 3. Linnawati 4. Gus Ni 5. Nurleli 6. Nopa Gusanti 7. Eka Saputra 8. Depi Susanti

Menurut Efendi et al., (2019) permasalahan yang dihadapi IKM sehingga menghambat perkembangannya yaitu:

1. Kurangnya permodalan dalam mengembangkan usahanya.
2. Keterbatasan keterampilan maupun pengetahuan dalam mengembangkan usahanya.
3. Lemahnya relasi atau jaringan bisnis (Business networking).
4. Keterbatasan dalam mengakses pasar.
5. Kapasitas produksi terbatas.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai terobosan dalam mengolah hasil perikanan yang akan mendorong ekonomi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Akan tetapi, pada kenyataannya selama ini para pelaku IKM belum bisa mengolah hasil perikanan yang ada di kabupaten Pesisir Selatan menjadi produk olahan secara maksimal. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada Desember 2022 kepada pelaku IKM yang mengikuti kegiatan *Matching Fund*, hal ini disebabkan oleh kurangnya permodalan, produksi terbatas, kurangnya kemampuan sumber daya pelaku IKM dan keterbatasan akses pasar yang lebih luas.

Berdasarkan penjelasan diatas, tidak hanya dibutuhkan bantuan modal tetapi juga dibutuhkan pendampingan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan keterampilan, pengetahuan, maupun kapasitas IKM itu sendiri. Dalam pemberdayaan pelaku IKM, Pemangku Kepentingan memiliki peran penting untuk membantu pelaku IKM dalam mengembangkan bisnis/usahanya. Dalam upaya pemberdayaan pelaku IKM,

tentunya diperlukan peran dan sinergitas dari berbagai Pemangku Kepentingan yang ada seperti pemerintah, akademisi, dan mitra bisnis. Pemerintah berwenang dalam membuat regulasi/kebijakan yang bersifat mengikat dalam rangka menjamin para Pemangku Kepentingan untuk bertindak berdasarkan koridor peraturan yang sudah ditetapkan. Selain itu, mitra bisnis merupakan pelaku bisnis yang dapat memberikan peluang dalam meningkatkan akses pasar yang lebih luas. Sedangkan akademisi berperan sebagai pihak yang melakukan pelatihan, pembinaan, penyuluhan dan lain-lain dalam rangka pemberdayaan pelaku IKM. Pemangku Kepentingan yang berperan di sini diantaranya yaitu, Wali Nagari, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, Budiman Swalayan, dan UNP sebagai Perguruan Tinggi.

Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab terhadap pemberdayaan IKM di daerahnya. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 173 Tahun 2021 Pasal 8 dan Pasal 12 tentang Bidang Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tugas dan kewajiban dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, pembinaan dan pengembangan SDM terhadap pengusaha, meningkatkan daya saing IKM di tingkat kabupaten lalu membantu mengembangkan produk lokal, memperbaiki sarana dan kondisi bisnis, melakukan promosi produk, memperluas akses ke pasar dan mengkoordinasikan penyediaan informasi serta memudahkan proses pemberian izin industri terutama bagi pelaku IKM.

Dalam konteks ini, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir melakukan perannya dalam pemberdayaan pelaku IKM guna untuk mengatasi masalah kurangnya permodalan, rendahnya sumber daya manusia dari pelaku IKM dan rendahnya motivasi pelaku IKM. Seperti dalam (mjnews.id), untuk penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kegiatan pelatihan salah satunya bagi IKM perikanan pada tahun 2023. Namun program pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi masih belum optimal karena terkendala anggaran dan juga sumber daya manusia dari pihak Dinas Perdagangan dan Transmigrasi itu sendiri.

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 2 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, Wali Nagari bertugas untuk mengatur pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan nagari, membina kemasyarakatan, dan mengembangkan masyarakat nagari. Berdasarkan hal tersebut, Wali Nagari memiliki tugas untuk menetapkan sendiri Peraturan Nagari.

Dalam hal ini, dalam pemberdayaan masyarakat wali nagari berperan untuk membuat peraturan nagari terkait pemberdayaan pelaku IKM dalam meningkatkan potensi ekonomi lokal, memberikan pelatihan, dan sebagainya dalam rangka pemberdayaan pelaku IKM. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga mendorong pemerintah nagari untuk mengaktifkan Badan Usaha Milik Nagari agar berbagai usaha masyarakat

memiliki mitra usaha sesuai bidangnya (berita.pesisirselatankab.go.id). Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, Wali Nagari sebagai belum berperan dalam pemberdayaan pelaku IKM perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan. Padahal Wali Nagari yang seharusnya memiliki peran signifikan dalam pemberdayaan Pelaku IKM perikanan di daerahnya. Wali nagari hanya mempermudah pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh pelaku IKM.

Berdasarkan wawancara awal dengan Vitra Hayati selaku bendahara IKM Uni Kito *Seafood*, mengatakan bahwa:

“.....pihak Wali Nagari sendiri belum melakukan perannya dan belum melakukan komunikasi secara intens dengan pelaku IKM. Karena sejauh ini pelatihan atau program yang di adakan baru dari dinas.” (Wawancara 9 Desember 2022)

Berdasarkan wawancara awal yang penulis lakukan, didapatkan hasil bahwa Wali Nagari belum melakukan perannya sebagai salah satu Pemangku Kepentingan dalam pemberdayaan Pelaku IKM di Kabupaten Pesisir Selatan.

Peran aktif pemerintah diperlukan dalam rangka pemberdayaan pelaku IKM. Pemerintah harus berperan dalam pembuat kebijakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi apa yang dibutuhkan pelaku IKM, mempercepat keterlaksanaan suatu program, mencari potensi melalui pengembangan produk, pemberian pembinaan, dan pengawasan produksi hingga pemasaran, serta mewujudkan pertumbuhan industri dan penciptaan lingkungan yang kondusif.

Dalam pengembangan IKM juga dibutuhkan peranan mitra bisnis,

seperti Budiman Swalayan yang bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan melalui Perguruan tinggi dalam memberikan akses pasar yang lebih luas kepada IKM untuk memperjualbelikan produknya. Namun dari 14 Kelompok IKM perikanan di Kecamatan Koto XI Tarusan, dengan lebih dari 20 produk olahan yang mereka miliki hanya dua produk yang bisa masuk ke Budiman Swalayan, yaitu Amplang Ikan dan Teri Berselimut. Hal ini disebabkan karena pelaku IKM kesulitan dalam memenuhi syarat atau standar produk dari Budiman Swalayan. Hal ini menjadi faktor penghambat peran Budiman Swalayan dalam pemberdayaan Pelaku IKM.

Gambar 1. 1 Produk IKM Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah masuk ke Budiman Swalayan



Selain pemerintah dan mitra bisnis, kerja sama juga dilakukan dengan akademisi yang juga berperan dalam pemberdayaan pelaku IKM di Kabupaten Pesisir Selatan. Perguruan tinggi memainkan peran yang signifikan dalam pemberdayaan Masyarakat. Perguruan tinggi dapat membantu memperkuat kapabilitas dan daya saing pelaku IKM dan

mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, UNP bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dalam kegiatan pengabdian. Dimana pada Desember 2022 UNP melakukan kegiatan *Matching Fund* dengan tema “Pendampingan Untuk Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan Kelompok Masyarakat”, dalam kegiatan ini UNP membantu dan memberdayakan pelaku IKM dalam meningkatkan kualitas produksi IKM serta pendampingan dan sosialisasi kepada pelaku IKM. Selain itu UNP juga menjembatani antara Pelaku IKM dengan dunia usaha seperti Budiman Swalayan. Namun, dalam menjalankan perannya perguruan tinggi juga mengalami kendala yang menyebabkan kegiatan pemberdayaan belum terlaksana secara optimal.

Kendala yang dihadapi Pemangku Kepentingan dalam pemberdayaan pelaku IKM adalah anggaran dana, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan waktu dan motivasi dari pelaku IKM itu sendiri juga masih kurang. Tidak semua pelaku IKM yang memiliki motivasi tinggi untuk mengikuti setiap pelatihan, sosialisasi maupun kemitraan dari Pemangku Kepentingan. Ini juga sebagai penghambat keberhasilan pemberdayaan pelaku IKM oleh Pemangku Kepentingan.

Dari paparan di atas bisa kita simpulkan bahwasanya Pemangku Kepentingan yang terlibat dalam pemberdayaan pelaku IKM perikanan dalam melaksanakan perannya masih belum optimal. Dibutuhkan pengoptimalan peran, koordinasi dan kerja sama dari para Pemangku Kepentingan agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai.

Penulis melakukan wawancara dengan mewawancarai Vitra Hayati, salah satu pelaku IKM perikanan Mandeh Saiyo di kabupaten Pesisir Selatan. Beliau mengatakan bahwa:

“...Pemangku Kepentingan memang benar-benar sangat berperan penting. Selain kemauan dari pelaku IKM sendiri untuk maju, nah Pemangku Kepentingan ini memang memiliki peran yang sangat penting. Tanpa adanya mereka, semua program-program yang ditargetkan untuk pengembangan IKM ini akan sangat sulit untuk dicapai, jika tidak ada kerja sama antara IKM dengan Pemangku Kepentingan”. (Wawancara 9 Desember 2022)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pemangku Kepentingan berperan penting dalam menunjang keberlangsungan IKM dan keefektifan program-program IKM. Jadi, berdasarkan jabaran latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU IKM DI KABUPATEN PESISIR SELATAN.”**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wali Nagari belum berperan dalam pemberdayaan pelaku IKM di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Peran Dinas Perdagangan dan Transmigrasi belum optimal dalam pemberdayaan pelaku IKM di Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Permasalahan yang dihadapi pelaku IKM, seperti keterbatasan produksi, keterbatasan dalam mengakses pasar, lemahnya jaringan bisnis, dan lain sebagainya.
4. Kurangnya kesadaran dan motivasi pelaku IKM.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah ini sebagai berikut:

1. Wali Nagari belum berperan dalam pemberdayaan pelaku IKM di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Peran Dinas Perdagangan dan Transmigrasi belum optimal dalam pemberdayaan pelaku IKM di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Motivasi pelaku IKM dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan masih kurang.

D. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana peranan Pemangku Kepentingan dalam pemberdayaan pelaku IKM Perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa faktor penghambat peranan Pemangku Kepentingan dalam pemberdayaan pelaku IKM Perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan jabaran rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis peranan Pemangku Kepentingan dalam pemberdayaan pelaku IKM Perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Menganalisis faktor penghambat peranan Pemangku Kepentingan dalam pemberdayaan pelaku IKM Perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang sudah disebutkan, dapat ditarik manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan pemahaman dan keilmuan dalam Ilmu Administrasi Negara, serta untuk mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi :
 - a. Bagi instansi pemerintah dapat digunakan sebagai masukan dalam pendampingan dan memberdayakan masyarakat.
 - b. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan tambahan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang peranan Pemangku Kepentingan dalam pemberdayaan pelaku IKM di kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. Lain dari itu, diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi bagi orang-orang yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang masalah yang serupa.